

Rengawasan Parlemerter terhadap Sektor Keamanan dan Gender

DAFTAR ISI

Mengapa gender penting dalam reformasi pertahanan?

Bagaimana cara gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pertahanan?

Tantangan dan peluang pasca konflik

Pertanyaan-pertanyaan untuk Reformasi Pertahanan

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat tentang manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam pengawasan parlemen terhadap sektor keamanan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukan pemaduan tersebut.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya - *lihat Informasi lebih lanjut*.

Mengapa gender penting dalam pengawasan parlementer?

Pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan: 'Lembaga legislatif melakukan pengawasan parlementer dengan menyetujui undang-undang yang merumuskan dan mengatur lembaga-lembaga keamanan dan kekuasaan mereka maupun apropriasi anggaran yang padan dengannya. Kontrol ini dapat juga mencakup pembentukan ombudsman parlemen atau komisi yang dapat memulai penyelidikan mengenai pengaduan masyarakat.'¹

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita. Oleh karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Pemaduan gender ke dalam pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan dapat membantu menciptakan kebijakan dan lembaga yang bertanggung jawab, efektif dan adil:

Kebijakan-kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan

- Sebagai wakil yang dipilih konstituen mereka, anggota parlemen bertanggung jawab menjamin kebutuhan keamanan wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki dimasukkan ke dalam pembuatan kebijakan keamanan. Misalnya, kekerasan berbasis gender, seperti perdagangan manusia, kekerasan pasangan intim, penganiayaan seksual, dan kekerasan anti-gay, adalah salah satu dari ancaman terbesar terhadap keamanan manusia di seluruh dunia.
- Proses-proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan melibatkan berbagai macam aktor dari masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi wanita, membantu menjamin konsensus umum tentang prioritas-prioritas keamanan, dan meningkatkan ketanggapan serta legitimasi kebijakan keamanan, lembaga keamanan dan parlemen sendiri.

Lembaga-lembaga keamanan yang eektif secara operasional



Buku Putih tahun 1996 mengenai Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan dirancang oleh Laurie Nathan dari Universitas Cape Town. Rancangan pertama buku tersebut ditanggapi secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Buku tersebut meliputi fokus pada keamanan manusia dan menitikberatkan penciptaannya budaya institusi non-seksis, yang meliputi kewajiban Kementerian Pertahanan mengidentifikasi dan menghapuskan praktik dan sikap diskriminatif dalam angkatan bersenjata. Selain itu, buku ini menyerukan program tindakan afirmatif dan peluang setara serta pengakuan hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan, termasuk peran tempur.

Buku Putih ini juga menyerukan pengkajian ulang sistem pertahanan untuk menguraikan rincian operasional seperti doktrin, rancangan kekuatan, logistik, persenjataan, sumber daya manusia dan peralatan. Berkat desakan para anggota parlemen wanita, Komite Tetap Gabungan Parlemen tentang Pertahanan menghimbau diadakannya konsultasi nasional sebagai bagian dari proses pengkajian ulang sistem pertahanan. Berbagai langkah diambil untuk menjamin partisipasi masyarakat, seperti penggunaan pesawat dan bus militer untuk mengangkut pemuka agama dan masyarakat, aktifis LSM dan wakil-wakil organisasi wanita menghadiri pertemuan dan lokakarya regional.

Organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting dalam menarik perhatian terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan, seperti dampak lingkungan dari kegiatan militer dan pelecehan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh personel militer. Untuk menanggapi isu-isu tersebut, dua sub-komite baru dibentuk di Departemen Pertahanan. Akhirnya, sifat partisipatif Pengkajian Ulang Pertahanan diakui telah membantu proses pencapaian konsensus nasional mengenai masalah pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru.

- Parlemen dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perwakilan wanita dalam lembaga-lembaga sektor keamanan dan jabatan-jabatan pemerintahan terkait, yang sudah ditunjukkan mempunyai bermacam-macam manfaat operasional.
- Parlemen berperan penting dalam mencegah dan mempertanggung-jawabkan lembaga-lembaga sektor keamanan terhadap diskriminasi, pelecehan seksual dan pelanggaran HAM.

Pembuatan keputusan parlemen yang bersifat mewakili

- Jumlah anggota parlemen wanita dan pria yang lebih setara, termasuk dalam komite-komite pertahanan maupun keamanan, dapat memperkuat legitimasi dan keadilan parlemen. Secara global, pada tahun 2007, 82,6% dari anggota parlemen adalah pria.²

Penyusunan anggaran dan manajemen sumber daya yang adil

- Analisis gender (Gender analysis) terhadap anggaran dan manajemen sumber daya dapat memperkuat transparansi, pertanggungjawaban dan pemutaran dana secara adil untuk menangani kebutuhan keamanan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

Kepatuhan terhadap kewajiban dalam undang-undang dan instrumen hukum internasional

Pemaduan gender ke dalam pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan diperlukan untuk mematuhi undang-undang, instrumen hukum dan norma internasional dan regional mengenai keamanan dan gender. Instrumen utama meliputi:

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Bagaimana cara memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer?

Tantangan dan peluang khusus yang terlibat dalam pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan berbeda antar-negara, jadi pengusulan yang berikut ini harus disesuaikan dengan konteks khusus negara tertentu:

Membuat kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan

- Proses yang partisipatif
 - Laksanakan konsultasi umum yang luas yang meliputi organisasi-organisasi wanita dan pria, tentang kebijakan-kebijakan keamanan.
 - Tetapkan mekanisme perdebatan publik, seperti misalnya dengar pendapat publik.
 - Para anggota parlemen masing-masing dapat menyediakan waktu luang mereka untuk mendengarkan pengaduan yang disampaikan organisasi-organisasi wanita perkotaan maupun pedesaan.
- Kebijakan keamanan yang tanggap terhadap gender
 - Masukkan isi yang berkaitan dengan gender, seperti misalnya memusatkan perhatian pada GBV dan mempromosikan partisipasi yang setara bagi pria dan wanita dalam lembaga-lembaga keamanan.
 - Gunakan bahasa yang inklusif gender ('para anggota polisi' ['police officers']) dan spesifik gender ('para anggota militer pria dan wanita' [male and female military personnel]) sesuai keperluan.
 - Minta pendapat pakar gender dalam merancang dan mengkaji ulang kebijakan keamanan.
 - Bentuk kaukus gender yang melibatkan para anggota parlemen wanita maupun pria, agar meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu gender.

- Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan baik yang diajukan maupun yang sudah diterapkan.

- **Pelatihan dan mandat gender bagi para pembuat kebijakan keamanan**

- Sediakan pelatihan dan pembangunan kemampuan tentang gender dan isu-isu keamanan bagi para anggota parlemen dan stafnya, khususnya yang duduk di komite-komite pertahanan dan keamanan.
- Jamin agar isu-isu gender dimasukkan ke dalam mandat komite-komite pertahanan dan keamanan.

Memperkuat efektivitas lembaga-lembaga sektor keamanan

- **Prakarsa untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan wanita dalam lembaga-lembaga sektor keamanan**

- Minta target-target tertentu perekrutan dan retensi wanita.
- Ubah kebijakan dan praktik sumber daya manusia demi keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik.
- Komisikan dan/atau minta data yang dipisahkan menurut jenis kelamin mengenai pengarusutamaan gender dan komposisi lembaga-lembaga sektor keamanan.
- Minta analisis mengenai calon wanita yang putus akademi polisi dan militer dan juga yang berhenti bekerja pada tahap lebih lanjut dalam karir mereka, dan pantau prakarsa-prakarsa untuk meningkatkan retensi wanita.

- **Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan**

- Jamin agar semua personil sektor keamanan diberikan pelatihan gender yang cocok.

- **Perundang-undangan yang menyeluruh tentang GBV**

- Pantau pelaksanaan tanggung jawab internasional, regional dan nasional tentang penghapusan GBV, termasuk dalam lembaga-lembaga sektor keamanan.
- Kembangkan perundang-undangan, kebijakan dan rencana aksi nasional tentang penghapusan GBV yang menyoroti pertanggungjawaban tertentu bagi sistem-sistem penegakan hukum, peradilan dan hukuman pidana.

- **Minta pertanggung-jawaban lembaga-lembaga dan personil keamanan atas pencegahan dan respons terhadap GBV**

- Jamin perundang-undangan dan kode perilaku yang jelas tentang tanggung jawab personil sektor keamanan atas pencegahan internal dan balasan terhadap pelanggaran HAM, termasuk prosedur pendisiplinan.
- Pantau pengaduan, penyidikan dan hukuman atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personil sektor keamanan.

- Buat penyelidikan/kajian mengenai sifat dan luasnya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lainnya GBV bersama dengan lembaga-lembaga sektor keamanan.

- **Ombudsman**

- Timbangkan terciptanya suatu jabatan, seperti misalnya ombudsman, dengan wewenang khusus untuk mengawasi pemaduan isu-isu gender dalam lembaga-lembaga pertahanan dan sektor keamanan lainnya.
- Pastikan kantor ombudsman mempunyai mandat dan keahlian untuk menangani GBV, termasuk tim gender atau para pakar gender.

Meningkatkan keterwakilan dan keikutsertaan wanita dalam parlemen

- **Tingkatkan keterwakilan wanita dalam parlemen**

- Laksanakan kuota konstitusi, legislatif atau partai sukarela, perbaiki sistem-sistem elektoral dan menyediakan dukungan dan pembangunan kemampuan calon peserta wanita.
- Bangkitkan kesadaran para wakil partai politik dan masyarakat umum mengenai pentingnya keterwakilan wanita dalam bidang politik.

- **Tingkatkan keseimbangan gendernya komite-komite keamanan dan pertahanan**

- Sahkan perundang-undangan yang menghimbau peningkatan keikutsertaan para anggota parlemen wanita dalam panitia-panitia yang terkait dengan keamanan (lihat Kotak 2).
- Timbangkan terciptanya target-target strategis atau kuota untuk keikutsertaan wanita di semua struktur komite.

Promosikan penyusunan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang adil

- **Penyusunan anggaran gender**

- Lakukan audit gender atas anggaran yang diajukan dan anggaran yang sudah berjalan untuk menjamin penyediaan dana untuk menangani kebutuhan keamanan wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan.

Kotak 2

Israel: keterwakilan setara dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan keamanan ⁴

Pada tahun 2005 Knesset, Parlemen Israel, mengesahkan amandemen Undang-undang Tahun 1956 tentang Keterwakilan Setara Wanita yang mengamankan keterlibatan wanita dalam tim-tim yang ditunjuk untuk merundingkan perdamaian dan menetapkan kebijakan dalam negeri, luar negeri atau keamanan.. Dua anggota parlemen memprakarsai undang-undang tersebut bekerja sama dengan Isha L'Isha (Wanita kepada Wanita), sebuah organisasi wanita tingkat akar rumput. Supaya undang-undang ini disetujui, sebuah koalisi ad hoc organisasi-organisasi wanita maupun perdamaian dibentuk dan lobi serta kampanye media yang ekstensif dilakukan.

- Padukan isu-isu gender ke dalam anggaran yang diusulkan.

■ Gender dan pengadaan peralatan pertahanan

- Jamin agar dana disediakan ('earmarked') untuk pembelian seragam dan perlengkapan yang disesuaikan dengan wanita, untuk fasilitas yang berbeda khusus wanita dan kebutuhan kesehatan reproduktif wanita.

- Pastikan peraturan perdagangan senjata nasional melarang perdagangan dengan rezim atau orang yang melakukan GBV.

Tersedia juga di Alat (Tool) 7...

- Contoh-contoh berbagai bentuk kuota untuk wanita

- Strategi-strategi praktis untuk menangani GBV

- Metode-metode penyusunan anggaran gender

Tantangan dan peluang pasca konflik

Tantangan bagi peluang pasca konflik

Di lingkungan pasca-konflik, peran pengawasan parlemen sering agak lemah.. Namun, parlemen berkesempatan berperan konstruktif dalam memastikan isu-isu gender dipadukan dalam proses penciptaan keamanan dan pembangunan kembali lembaga-lembaga sektor keamanan.

Tantangan bagi pemaduan isu gender

- Peran dan wewenang parlemen dapat dibayangkan, khususnya berkaitan dengan pengawasan lembaga-lembaga keamanan seperti militer.
- Karena sektor keamanan merupakan bidang yang sangat kompleks, tidak semua anggota parlemen mempunyai pengetahuan atau keahlian yang memadai untuk pengawasan yang efektif, khususnya dalam konteks pasca-konflik.
- Para anggota parlemen dan lembaga-lembaga keamanan mungkin menganggapi organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai penantang politis, dan oleh karena itu mereka enggan bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita.
- Partisipasi dalam politik dan pasukan keamanan mungkin menimbulkan asosiasi-asosiasi negatif

akibat kekerasan pada masa lalu serta pelanggaran HAM. Hal ini mungkin menyulitkan peningkatan partisipasi wanita.

- Pengutamaan isu-isu gender, seperti misalnya GBV, dapat dihadapkan perlawanan, kalau ancaman-ancaman keamanan lainnya dianggap lebih mendesak.

Peluang bagi pemaduan isu gender

- Parlemen dapat mengadvokasi pelibatan wanita (misalnya para anggota parlemen wanita) dalam perundingan perdamaian dan pemaduan isu-isu gender dalam perjanjian perdamaian.. Perjanjian perdamaian sering berperan sebagai kerangka bagi RSK.
- Pengawasan terhadap proses-proses perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi dapat memberikan titik masuk untuk memastikan kebutuhan para bekas penempur pria dan wanita ditangani secara memadai.
- Parlemen dapat menggunakan kekuasaan legislatif, pengawasan dan anggaran untuk mempengaruhi reformasi yang tanggap terhadap gender dalam sistem-sistem peradilan dan hukuman pidana.
- Proses-proses RSK memberikan kesempatan bagi para anggota parlemen memastikan isu-isu gender seperti GBV ditangani dan prakarsa-prakarsa tertentu diambil untuk merekrut para wanita.
- Transformasi kebijakan elektoral dan parlemen sendiri pasca-konflik memberikan kesempatan untuk melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan persentase para anggota parlemen wanita (termasuk dalam komite-komite pertahanan dan pengamanan) dan membentuk mekanisme konsultasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil.
- Para donatur mungkin bersedia menunjang reformasi yang tanggap terhadap gender termasuk pembangunan kemampuan gender bagi para anggota parlemen pria dan wanita.

Kotak 3

Penerapan kuota konstitusi: reformasi di Afghanistan dan Irak 5

Afghanistan berubah dari negara yang didalamnya hak-hak wanita sangat dibatasi menjadi negara yang menjamin kesetaraan gender menurut undang-undang. Dalam bidang keterwakilan politik, konstitusi baru tersebut menjamin pelibatan formal wanita dalam proses pembuatan keputusan politik. Pasal 82 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya dua calon wanita dari masing-masing provinsi harus dipilih sebagai anggota parlemen. Ketentuan konstitusi ini berhasil dilaksanakan. Pada pemilihan umum bulan September 2005, 69 wanita terpilih sebagai anggota Wolesi Jirga (majelis rendah parlemen), yang merupakan sekitar 27% dari 249 anggotanya.

Begitu pula, konstitusi baru Irak, yang disahkan pada bulan Oktober 2005, menjamin seperempat dari 275 kursi parlemen untuk wanita. Kuota konstitusi juga diterapkan di Irak. Setelah pemilihan umum bulan Desember 2005, wanita mencapai seperempat dari keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Nasional. Dua hasil pemilihan umum ini sangat signifikan di kawasan di mana wanita tetap kurang terwakili dalam pembuatan keputusan politik dan, dalam sebagian kasus, wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.

? Pertanyaan-pertanyaan tentang pengawasan parlementer

Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk menanyakan ketika menilai apakah isu-isu gender dipadukan dalam pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan meliputi:

- Apakah para anggota parlemen yang duduk di komite-komite pertahanan dan keamanan sudah menerima pembangunan kemampuan gender, seperti pelatihan gender atau pengarahan?
- Apakah kerangka resmi dan/atau tidak resmi ditentukan untuk konsultasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil mengenai isu-isu keamanan, termasuk organisasi-organisasi wanita?
- Keterwakilan apa para anggota parlemen pria dan wanita dalam panitia-panitia yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan?

Informasi lebih lanjut

Sumber daya

Byanyima, W. dan Wehner, J. - *Parliament, the Budget and Gender - IPU Handbook for Parliamentarians N° 6* (Parlemen, Anggaran dan Gender - Buku Pedoman Persatuan Antar-Parlemen (IPU) untuk Para Anggota Parlemen N° 6), 2004.

Born, H., Fluri, P. dan Johnson, A. penyunting. - *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices* (Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik), DCAF dan IPU, 2003 (tersedia dalam 40 bahasa).

Freeman, M. - *Making Reconciliation Work: the Role of Parliaments - IPU Handbook for Parliamentarians N° 10* (Mewujudkan Rekonsiliasi: Peran Parlemen - Buku Pedoman Persatuan Antar-Parlemen (IPU) untuk Para anggota parlemen N° 10), 2005.

Organisasi-organisasi

Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA) (Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika) –

www.awepa.org

iKNOW Politics: International Knowledge Network of Women in Politics (Jaring Pengetahuan Internasional Wanita dalam Politik) – www.iknowpolitics.org

Initiative for Inclusive Security (Prakarsa Keamanan yang Inklusif) – www.huntalternatives.org/pages/7_the_initiative_for_inclusive_security.cfm

- Apakah kantor ombudsman sudah ditetapkan dan ombudsman tersebut diberikan amanat dan kemampuan untuk menangani isu-isu gender?
- Apakah ada prakarsa untuk meningkatkan keterwakilan wanita dalam parlemen, seperti sistem-sistem kuota atau dukungan bagi calon peserta wanita?
- Apakah perundang-undangan disahkan yang menjamin keikutsertaan yang menyeluruh dan setara bagi wanita dan pria dalam lembaga-lembaga sektor keamanan? Apakah perundang-undangan yang memadai ditentukan mengenai GBV?
- Apakah kaukus gender/wanita sudah ditentukan? Apakah isu-isu keamanan dibahas dalam kaukus tersebut?
- Apakah analisis anggaran gender diterapkan pada anggaran-anggaran yang berkaitan dengan keamanan?

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Elektoral) - www.idea.int

Inter-Parliamentary Union (Persatuan Antar-Parlemen) – www.ipu.org

Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
 2. Reformasi Kepolisian dan Gender
 3. Reformasi Pertahanan dan Gender
 4. Reformasi Peradilan dan Gender
 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender
 6. Manajemen Perbatasan dan Gender
 7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender
 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender
 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender
 10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan
- Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional

Tiap-tiap Alat dan Catatan Praktis tersedia dari: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org dan www.osce.org/odhr.

Catatan Praktis ini disiapkan Mugiho Takeshita, DCAF, berdasarkan atas Tool (Alat) 7, Ilja Luciak, penulis.

¹ DCAF and IPU, *Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices* (Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik), DCAF and IPU, 2003, p. 22. http://www.dcaf.ch/oversight_publications.cfm?navsub1=12&navsub2=3&n_av1=3

² IPU (Persatuan Antar-Parlemen), *Women in National Parliaments* (Wanita di Parlemen Nasional), 31 Oktober 2007. <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>

³ Anderlini, S.N. dan Conway, C.P., *Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women* (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan), (Initiative for Inclusive Security:

Washington DC) , 2004, h. 17-18; 23-25.

⁴ Isha L'Isha News Release (Storan Berita Isha L'Isha [Wanita kepada Wanita] (21 Juli 2005), *Parliament/Knesset Passes New Law Mandating Inclusion of Women for Peace and Security Negotiations & Policy* (Parlemen/Knesset Menyetujui Undang-undang Baru yang Mengharuskan Pelembutan Wanita dalam Perundingan dan Pembuatan Kebijakan Perdamaian dan Keamanan). <http://www.peacewomen.org/news/Israel-OPT/July05/Knesset.html>

⁵ IPU (Persatuan Antar-Parlemen), *Women in Politics* (Wanita dalam Politik). <http://www.ipu.org/wmn-esuffrage.htm>; Mosadiq, *The New Afghan Constitution* (Undang-undang Dasar Afghanistan yang Baru).

